

Implementasi Governansi Digital dalam Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

Ni Luh Putu Ening Permini ¹, I Gede Angga Bujana Ariana ²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ,Universitas Ngurah Rai – Denpasar Bali

Email : ening.permini@gmail.com

ABSTRACT: *Inclusive community development is a crucial goal for local governments, ensuring that every citizen, without exception, has equal access and opportunity in development. In the digital era, digital governance has emerged as a strategic instrument to achieve this goal. This abstract discusses the implementation of digital governance in realizing inclusive community development in Banyumas Regency. This study uses a qualitative approach with a case study in Banyumas Regency, analyzing various digital initiatives that have been implemented, such as online public service platforms, village information systems, and digital literacy programs. The results of the study show that the implementation of digital governance in Banyumas Regency has made a significant contribution to community inclusion by increasing access to information and public services, increasing community participation, and strengthening transparency and accountability in governance. Various digital innovations have made it easier for people, including vulnerable groups and people in remote areas, to access basic services such as licensing, health, and education without geographical or time constraints. In addition, digital platforms have opened up space for people to be more active in voicing their aspirations, providing input, and participating in the policy-making process. However, challenges such as the digital divide (internet access and device ownership), varying digital literacy, and data security remain major concerns that need to be addressed to ensure equitable and sustainable inclusion.*

keywords: digital governance, development, inclusive, society

ABSTRAK : Pembangunan masyarakat yang inklusif menjadi tujuan krusial bagi pemerintah daerah, memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pembangunan. Di era digital, governansi digital muncul sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan ini. Abstrak ini membahas implementasi governansi digital dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Banyumas, menganalisis berbagai inisiatif digital yang telah diterapkan, seperti platform layanan publik daring, sistem informasi desa, dan program literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi governansi digital di Kabupaten Banyumas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi masyarakat melalui peningkatan akses informasi dan layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan transparansi serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Berbagai inovasi digital telah mempermudah masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, untuk mengakses layanan dasar seperti perizinan, kesehatan, dan pendidikan tanpa batasan geografis atau waktu. Selain itu, platform digital telah membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital (akses internet dan kepemilikan perangkat), literasi digital yang bervariasi, dan keamanan data masih menjadi perhatian utama yang perlu diatasi untuk memastikan inklusi yang merata dan berkelanjutan.

kata kunci : governansi digital, pembangunan, inklusif, masyarakat

PENDAHULUAN

Membangun masyarakat yang inklusif merupakan salah satu tujuan fundamental pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi digital telah muncul sebagai kekuatan transformatif dengan potensi besar untuk mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut. Namun, pemanfaatan teknologi ini secara optimal dan berkeadilan mensyaratkan adanya kerangka kerja yang solid, dikenal sebagai governansi digital (Dawes, 2018). Governansi digital tidak hanya mencakup aspek teknis

infrastruktur dan platform digital, melainkan juga melibatkan seperangkat kebijakan, regulasi, standar, dan mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk mengarahkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara etis, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini esensial untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali (Dunleavy, et.al. 2019).

Isu inklusivitas menjadi krusial karena kesenjangan digital (digital divide) masih menjadi tantangan signifikan di banyak wilayah, termasuk di negara berkembang. Kesenjangan ini tercermin dalam disparitas akses terhadap internet, perangkat keras, literasi digital, serta kemampuan untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Tanpa intervensi governansi yang tepat, digitalisasi justru dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga merupakan pilar penting dalam governansi digital untuk masyarakat yang inklusif. Kepercayaan publik terhadap ekosistem digital sangat bergantung pada jaminan bahwa data pribadi mereka aman dan privasi mereka terlindungi (Saintika & Kartiko, 2023).

Transformasi digital telah mengubah paradigma tata kelola pemerintahan (governance), mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, serta peningkatan partisipasi publik melalui teknologi digital. Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perda RPIP e-government (Perda No. 4/2012) sebagai payung hukum pengembangan integrasi sistem digital pemerintahan. Pembangunan inklusif dalam konteks digital governance mengarah pada pemerataan akses sumber daya digital bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan warga pedesaan. Pembangunan masyarakat yang inklusif merupakan pilar utama dalam mencapai kesejahteraan yang merata. Di era digital saat ini, governansi digital muncul sebagai instrumen krusial untuk mengakselerasi tujuan tersebut. Governansi digital, yang mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan (Fanti, 2025).

Kabupaten Banyumas, dengan potensi dan karakteristik demografinya, memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan governansi digital guna mewujudkan masyarakat yang inklusif. Inklusi dalam konteks ini berarti memastikan akses yang setara terhadap layanan publik, informasi, serta peluang ekonomi dan sosial bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Tantangannya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan kebijakan governansi digital yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada peningkatan

literasi digital, partisipasi aktif masyarakat, dan adaptasi layanan agar sesuai dengan kebutuhan beragam individu (Harimurt, 2024). Melalui governansi digital yang adaptif dan berpusat pada masyarakat, Banyumas dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih adil dan merata. Pendahuluan ini akan mengeksplorasi bagaimana strategi dan implementasi governansi digital dapat secara efektif menjembatani kesenjangan, meningkatkan partisipasi publik, dan pada akhirnya, mendorong pembangunan masyarakat yang benar-benar inklusif di Banyumas.

Kabupaten Banyumas juga menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Dalam era revolusi industri 4.0 dan disrupsi digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi krusial. Salah satu pendekatan strategis yang patut dikembangkan adalah governansi digital. Governansi digital tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik, melainkan juga sebuah kerangka kerja komprehensif yang melibatkan proses, struktur, dan nilai-nilai untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah (Ramadhani dan Adnan, 2024). Di Banyumas, implementasi governansi digital memiliki potensi signifikan untuk mengatasi berbagai persoalan klasik seperti birokrasi yang lambat, akses informasi yang terbatas, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip governansi digital, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana governansi digital ini tidak hanya menjadi alat peningkatan efisiensi, tetapi juga motor penggerak untuk menciptakan masyarakat yang inklusif (Lestari, 2022).

Pembangunan masyarakat inklusif berarti memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, disabilitas, atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, fokus pada implementasi governansi digital di Banyumas harus diarahkan pada bagaimana teknologi dapat menjembatani kesenjangan, meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi yang pada akhirnya akan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banyumas (Rochmah, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Governansi Digital (E-Governance)

Governansi digital telah didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Secara umum, governansi digital merujuk pada penggunaan TIK oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam memberikan informasi dan layanan publik kepada warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya (UNPAN, 2002). Layanan governansi digital dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori: G2C (Government-to-Citizen), G2B (Government-to-Business), G2G (Government-to-Government), dan G2E (Government-to-Employee) (Dawes, 2008). Implementasi governansi digital diharapkan dapat mendorong transformasi birokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi (Layne & Lee, 2001).

Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif adalah pendekatan pembangunan yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada proses pembangunan tersebut (OECD, 2017). Konsep ini menyoroti perlunya mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi kelompok-kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, masyarakat adat, dan kelompok berpenghasilan rendah. Indikator pembangunan inklusif meliputi akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, layanan keuangan, infrastruktur, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2016).

Hubungan Governansi Digital dan Pembangunan Inklusif

Governansi digital memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan inklusif melalui beberapa mekanisme:

- Peningkatan Akses Informasi:
Platform digital dapat menyediakan informasi publik secara luas dan mudah diakses, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau.

- Akses Layanan Publik yang Lebih Baik:
Aplikasi dan portal online dapat menyederhanakan proses layanan, mengurangi birokrasi, dan memungkinkan akses layanan dari mana saja dan kapan saja. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau geografis.
- Peningkatan Partisipasi Warga:
Forum daring, survei elektronik, dan platform pengaduan dapat memfasilitasi partisipasi warga dalam perumusan kebijakan dan pengawasan kinerja pemerintah, termasuk suara dari kelompok minoritas atau terpinggirkan (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010).
- Transparansi dan Akuntabilitas:
Publikasi data dan informasi secara online dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mengurangi praktik korupsi, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil dan merata.
- Pemberdayaan Kelompok Rentan:
TIK dapat digunakan untuk mengembangkan program-program khusus yang memberdayakan kelompok rentan, misalnya melalui pelatihan keterampilan digital atau platform jual beli produk UMKM (Prabhu, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi governansi digital dan dampaknya terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Banyumas. Adapun paradigma dari penelitian ini adalah interpretivisme atau konstruktivisme sosial, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan interpretasi dari pengalaman subjek penelitian terkait governansi digital dan inklusivitas (Miles, et.al.2014)

Desain studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks spesifik, interaksi, dan proses yang terjadi dalam implementasi governansi digital serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dengan Kabupaten Banyumas menjadi analisis utamanya yang didasarkan pada potensi dan inisiatif yang mungkin sudah ada terkait governansi digital, serta karakteristik masyarakatnya yang beragam. Data akan dikumpulkan melalui metode triangulasi untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi dengan studi dokumentasi yakni, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan seperti: Peraturan daerah (Perda) atau kebijakan terkait governansi digital, e-government, Smart City, dll, Laporan kinerja pemerintah daerah, Publikasi statistik daerah terkait akses internet, tingkat literasi digital,

Berita atau artikel media massa lokal terkait inisiatif digital pemerintah, Situs web resmi pemerintah daerah dan platform layanan digital dan dookumen-dokumen lainnya yang relevan.

Data dianalisis secara induktif dan interatif. Sehingga dapat menginterpretasikan makna dari kategori dan tema yang terbentuk, menghubungkannya dengan kerangka teoritis, dan mensintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga Data yang terkumpul dapat mengidentifikasi pola, tren, tantangan, dan peluang dalam implementasi governansi digital untuk mendukung pembangunan inklusif di Banyumas (Nawawi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Governansi Digital di Kabupaten Banyumas

Banyumas telah mengembangkan berbagai inovasi dan aplikasi digital dalam rangka mewujudkan digital governance. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Aplikasi Pelayanan Perizinan Online (Sipanjimas): Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas telah mengimplementasikan aplikasi Sipanjimas untuk pelayanan perizinan online. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan perizinan tanpa harus datang ke kantor secara fisik.
- b. Aplikasi Sampah Online Banyumas (SALINMAS): Inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan sampah, terutama di wilayah perkotaan. Aplikasi ini berfokus pada kampanye pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.
- c. Aplikasi Lapak Aduan: Aplikasi ini berfungsi sebagai kanal pengaduan masyarakat kepada pemerintah daerah, memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau aspirasi secara online.
- d. Website dan Sistem Informasi Dinas/Instansi: Hampir setiap dinas dan instansi di lingkungan Pemkab Banyumas memiliki website atau sistem informasi sendiri untuk menyediakan informasi dan beberapa layanan dasar. Contohnya adalah website Dindukcapil Banyumas yang menyediakan informasi dan layanan terkait administrasi kependudukan.
- e. PPDB Online: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga telah mengimplementasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.

- f. Inovasi Pembelajaran Digital: Bahkan di sektor pendidikan, Banyumas menjadi pelopor inovasi pembelajaran digital dengan pelatihan koding dan kecerdasan buatan bagi guru SD.

Pembangunan Inklusi di Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas, bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas, memfokuskan upaya inklusi sosial pada beberapa kelompok rentan, antara lain:

- a. Penyandang Disabilitas: Kelompok ini seringkali menghadapi hambatan aksesibilitas (fisik dan non-fisik), diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
- b. Kelompok Masyarakat Miskin dan Rentan Ekonomi: Mereka seringkali kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan peluang ekonomi.
- c. Lansia: Kelompok usia lanjut rentan terhadap isolasi sosial, masalah kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap layanan.
- d. Anak-anak dan Remaja: Terutama mereka yang berada dalam situasi rentan (misalnya anak jalanan, anak dengan kebutuhan khusus, atau anak dari keluarga miskin) membutuhkan perlindungan dan akses pendidikan yang layak.
- e. Perempuan: Meskipun tidak selalu masuk kategori rentan, perempuan masih menghadapi isu kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesempatan kerja dan partisipasi politik.
- f. Kelompok Minoritas (jika ada): Meskipun Banyumas relatif homogen, perhatian juga diberikan pada potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menjalankan berbagai program dan inisiatif untuk mendorong inklusi sosial, seringkali bekerja sama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO). Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Peraturan Daerah (Perda) terkait Disabilitas: Adanya payung hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka.
- b. Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas: Infrastruktur Ramah Disabilitas: Upaya peningkatan aksesibilitas di fasilitas publik seperti trotoar, gedung pemerintahan, sekolah, dan puskesmas. Namun, implementasinya masih bertahap dan memerlukan evaluasi berkelanjutan.

- c. Pendidikan Inklusif: Mendorong sekolah-sekolah untuk menerima dan memberikan fasilitas yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas.
- d. Pelatihan Keterampilan dan Kesempatan Kerja: Beberapa program memberikan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, seringkali bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) atau perusahaan swasta.
- e. Bantuan Sosial dan Alat Bantu: Pemberian bantuan sosial atau alat bantu (kursi roda, alat dengar, dll.) kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan.
- f. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Pelaksanaan program-program nasional untuk membantu keluarga miskin.
- g. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM), berbagai pelatihan dan pendampingan diberikan kepada pelaku UMKM, termasuk dari kelompok rentan.
- h. Kartu Banyumas Sejahtera (KBS): Program lokal yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau rentan.
- i. Program Sanitasi dan Air Bersih: Pembangunan sarana sanitasi dan penyediaan akses air bersih yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
- j. Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak: Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga): Memberikan layanan konseling dan edukasi bagi keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah kekerasan. Forum Anak: Memberikan wadah bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka dalam perencanaan pembangunan daerah, Penanganan Anak Jalanan dan Anak Berhadapan Hukum: Melalui dinas sosial, upaya rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan.
- k. Peningkatan Kualitas Hidup Lansia: Posyandu Lansia: Menyediakan layanan kesehatan dasar dan kegiatan sosial bagi lansia di tingkat komunitas, Program Kunjungan ke rumah lansia yang mengalami kesulitan mobilitas.
- l. Pendidikan dan Literasi: Program Kejar Paket: Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah untuk mendapatkan ijazah setara, perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM): Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya literasi.

Integrasi Governansi Digital dan Pembangunan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Banyumas

Integrasi governansi digital dan inklusi sosial berarti bahwa setiap inisiatif digital yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak dan aksesibilitasnya bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan. Ini bukan sekadar penambahan fitur aksesibilitas, melainkan sebuah filosofi bahwa teknologi harus menjadi jembatan, bukan penghalang, bagi partisipasi dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Governansi Digital merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Di Banyumas, ini tercermin melalui berbagai aplikasi seperti Sipanjimas, SALINMAS, dan Lapak Aduan. Untuk mencapai integrasi yang efektif, Banyumas perlu menerapkan strategi yang terencana, diantaranya:

1. Desain Layanan Digital yang Aksesibel (Universal Design)

- Antarmuka Pengguna Ramah Disabilitas: Aplikasi dan website pemerintah harus dirancang agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas (misalnya, dengan fitur pembaca layar, kontras warna yang memadai, navigasi keyboard).
- Bahasa yang Sederhana dan Mudah Dipahami: Konten digital harus menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti oleh berbagai tingkat pendidikan masyarakat.
- Multisaluran Akses: Tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan menggunakan smartphone atau internet. Oleh karena itu, layanan digital harus didukung oleh saluran alternatif, seperti layanan tatap muka di balai desa, pusat komunitas, atau melalui pendampingan petugas.

2. Peningkatan Literasi Digital dan Pendampingan

- Pelatihan Komunitas: Mengadakan pelatihan literasi digital secara berkala di tingkat desa/kelurahan, menargetkan kelompok rentan seperti lansia, ibu rumah tangga, dan penyandang disabilitas.
- Pendampingan Personal: Menyediakan "help desk" atau petugas khusus di kantor-kantor pelayanan dan balai desa yang dapat membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital.
- Pemanfaatan Kader/Relawan: Melibatkan kader PKK, karang taruna, atau relawan disabilitas sebagai agen literasi digital di komunitas mereka.

3. Data Berbasis Inklusi untuk Perencanaan yang Tepat

- Sistem Informasi Terpadu: Mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan data tentang kelompok rentan (penyandang disabilitas, keluarga miskin, lansia) secara akurat. Data ini harus digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan menargetkan program digital secara efektif.
- Umpan Balik Inklusif: Membangun mekanisme umpan balik yang memungkinkan kelompok rentan untuk memberikan masukan tentang pengalaman mereka menggunakan layanan digital, dan memastikan masukan tersebut ditindaklanjuti.

4. Kemitraan Multipihak

- Kolaborasi dengan Organisasi Disabilitas: Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perancangan dan pengujian aplikasi pemerintah untuk memastikan aksesibilitasnya.
- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Mendorong perusahaan teknologi atau telekomunikasi untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital di daerah terpencil atau memberikan pelatihan literasi digital sebagai bagian dari CSR mereka.
- Peran Akademisi: Melibatkan perguruan tinggi lokal untuk melakukan penelitian, evaluasi, dan pengembangan model inklusi digital yang sesuai dengan konteks Banyumas.

Banyumas telah memiliki fondasi governansi digital yang cukup baik dengan berbagai aplikasi yang diluncurkan. Namun, tantangan utama dalam integrasi terletak pada kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan kemampuan masyarakat untuk mengakses serta memanfaatkannya, terutama kelompok rentan.

Potensi Integrasi governansi digital dan pembangunan masyarakat Inklusi di Banyumas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sipanjimas (Perizinan Online): Dapat dioptimalkan dengan fitur aksesibilitas yang lebih baik dan pendampingan bagi pelaku UMKM dari kelompok rentan agar dapat mengurus izin usaha secara mandiri.
- Lapak Aduan: Dapat menjadi kanal yang lebih inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas dapat dengan mudah menyampaikan keluhan dan mendapatkan respons yang adil. Misalnya, melalui fitur pengaduan suara atau video.

- SALINMAS (Sampah Online): Bisa diperluas untuk melibatkan komunitas penyandang disabilitas atau kelompok marginal dalam proses pengelolaan sampah, memberikan mereka peluang ekonomi dan partisipasi aktif.
- PPDB Online: Dapat memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendaftaran sekolah tanpa hambatan digital.

Tantangan dalam Implementasi Governansi Digital dalam Pembangunan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Banyumas

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan implementasi governansi digital dalam pembangunan masyarakat inklusif di Kabupaten Banyumas yang terintegrasi dengan baik, diantaranya:

- a. Keterbatasan Anggaran: Dana yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam perluasan jangkauan program dan pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya inklusif.
- b. Kurangnya Data yang Terintegrasi dan Akurat: Data yang tidak akurat atau tidak terintegrasi tentang kelompok rentan dapat menghambat efektivitas penargetan program.
- c. Kurangnya Kesadaran dan Perubahan Pola Pikir Masyarakat: Stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas atau orang dengan masalah kejiwaan, masih ada di sebagian masyarakat. Edukasi dan kampanye sosial berkelanjutan sangat diperlukan.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang isu inklusi sosial di tingkat pemerintahan dan komunitas.
- e. Aksesibilitas yang Belum Merata: Meskipun ada upaya, aksesibilitas fisik di ruang publik dan fasilitas umum masih belum sepenuhnya memadai, terutama di daerah pedesaan.
- f. Koordinasi Lintas Sektor yang Perlu Ditingkatkan: Program inklusi sosial melibatkan banyak pihak (dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dll.). Koordinasi yang belum optimal dapat menyebabkan tumpang tindih atau celah program.

- g. Partisipasi Kelompok Rentan yang Belum Optimal: Seringkali, kelompok rentan sendiri belum sepenuhnya terlibat dalam perencanaan dan evaluasi program yang ditujukan untuk mereka.

KESIMPULAN

Implementasi governansi digital di Kabupaten Banyumas menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif. Digitalisasi layanan publik dan transparansi informasi melalui platform online dapat menjembatani kesenjangan akses dan partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Adapun yang dapat disimpulkan diantaranya:

- a. Melalui program literasi digital dan penyediaan akses internet di area publik, governansi digital dapat memberdayakan kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat miskin, untuk ikut serta dalam pembangunan.
- b. Implementasi governansi digital juga sangat bergantung pada literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan komitmen pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan memastikan keberlanjutan program digital.
- c. Tantangan seperti kesenjangan digital antarwilayah dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat harus terus diatasi untuk memastikan governansi digital benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Banyumas.

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam mengidentifikasi peluang untuk lebih meningkatkan implementasi governansi digital yang inklusif di Banyumas, maka dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan, seperti:

- a. Pengembangan Kebijakan Inklusif: Mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas secara eksplisit dalam kebijakan governansi digital.
- b. Peningkatan Infrastruktur dan Akses: Memperluas jangkauan internet dan penyediaan fasilitas akses publik.

- c. Program Literasi Digital Berskala Besar: Menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang menargetkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
- d. Desain Layanan yang Berpusat pada Pengguna (User-Centric Design): Mengembangkan aplikasi dan platform yang intuitif, mudah digunakan, dan mengakomodasi kebutuhan beragam pengguna, termasuk fitur aksesibilitas.
- e. Kolaborasi Multistakeholder: Melibatkan komunitas, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi inisiatif governansi digital.
- f. Penguatan Kapasitas SDM Pemerintah: Peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam bidang TIK dan layanan publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2020). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for governments. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-272.
- Dawes, S. S. (2018). The evolution and ongoing challenges of e-governance. *Public Administration Review*, 68(s1), S85-S102.
- Dunleavy, P., et al. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporation, The State and E-Government*. Oxford University Press
- Fanti, L. A. (2025). Implementasi OSS-RBA di Banyumas. <https://ejournal.unsoed.ac.id>
- Harimurti, P. (2024). Smart Village Sudagaran Banyumas. *Jurnal Unsika*
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122-136.
- Lestari, T. L. et al. (2022). Kolaboratif Gendis untuk disabilitas di Banyumas <https://ejurnal.lppmunsera.org>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nawawi, H.H. (2018). *Metodologi Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.

- Ramadhani, S. N., & Adnan, M. (2024). Inovasi “SALINMAS” di Banyumas. <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Rochmah, I. A. (2022). Gratis Kabeh Dinas Dukcapil Banyumas. <https://ejournal.unsoed.ac.id>
- Saintika, Y., & Kartiko, C. (2023). Perencanaan strategis pengembangan e-government di Kabupaten Banyumas. e-journal.trunojoyo.ac.id